

ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN JASA KEUANGAN DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KOPERASI DI INDONESIA

La Sinaini
Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Wuna Raha

Abstrak

Koperasi merupakan salah satu unit ekonomi yang didasarkan atas asas kekeluargaan. Pengelolaan koperasi yang baik akan sangat menentukan kemajuan koperasi dan berdampak pada kesejahteraan anggota dan kemajuan ekonomi Bangsa. Tujuan daripada penulisan paper ini adalah untuk menganalisis perkembangan koperasi serta menganalisis peluang dan tantangan jasa keuangan dalam pengembangan kapasitas koperasi di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui angka-angka laju pertumbuhan, daya serap, daya aktif dan korelasi antar variabel dengan menggunakan bantuan *microsoft office excel 2007* dan *SPSS 16*. Hasil penelitian menunjukkan koperasi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 4,25%. Keaktifan koperasi di Indonesia rata-rata sebesar 70,68%. Daya serap anggota rata-rata sebesar 4,63% dan daya serap karyawan rata-rata sebesar 13,05%. Laju pertumbuhan modal sendiri koperasi di Indonesia rata-rata sebesar 38,72% dan laju pertumbuhan modal luar rata-rata sebesar 29,64%. Wilayah penyumbang terbesar dalam peningkatan koperasi di Indonesia adalah Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Implikasi dari perkembangan koperasi di Indonesia akan terus mendorong kinerja perekonomian Bangsa, sehingga berdampak juga pada terbukanya peluang besar bagi lembaga jasa keuangan untuk berperan aktif dan sekaligus menjadi tantangan dalam menghadapi persaingan pasar global.

Keywords: *Koperasi, skala usaha, dan jasa keuangan*

1. PENDAHULUAN

Masih teringat krisis ekonomi tahun 1997 yang membawa permasalahan besar bagi kehidupan bangsa Indonesia dengan berbagai dampak negatifnya termasuk kehidupan dunia usaha nasional baik usaha besar maupun pengusaha kecil, menengah dan koperasi yang saat itu sedang terpuruk akibat krisis ekonomi.

Kondisi sulit yang dialami saat itu merupakan akibat dari akumulasi kebijaksanaan program yang salah dilakukan pemerintah orde baru. Praktek-praktek bisnis yang dilakukan para pengusaha besar dan birokrat dengan cara KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) yang mengarah kepada pemusatan kekuatan asset ekonomi produktif pada sekelompok orang tertentu ternyata banyak menimbulkan permasalahan. Konsep

pertumbuhan ekonomi yang dikejar selama itu telah berorientasi kepada praktek-praktek monopoli, oligopoli, monopsoni dan oligopsoni, ternyata tidak menghasilkan penetasan kebawah (*tickle down effect*). Justru yang terjadi adalah kesenjangan semakin lebar baik antar wilayah, sektor, pelaku ekonomi dan masyarakat. Namun yang lebih ironis, para konglomerat yang kurang lebih jumlahnya 300 orang yang pada waktu itu banyak menerima fasilitas dari pemerintah, tidak sanggup lagi bertahan dengan hutang luar negeri yang hampir US\$ 68 milyar.

Sebaliknya yang menarik dan patut dicermati adalah kondisi pengusaha kecil yang relatif masih tegar dalam situasi krisis ini. Hasil studi Departemen Koperasi dan PKM menunjukkan hanya 4% saja pengusaha kecil menghentikan

usahanya. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dari 27 propinsi, sekitar 31% mengurangi usahanya dan bahkan 0,9% relatif masih memiliki potensi pertumbuhan dan perkembangan yang cukup besar untuk berperanserta dan memperkuat struktur perekonomian nasional.

Kondisi krisis yang telah dilalui cukup menjadi pelajaran bagi bangsa ini dan tentunya membuka perhatian kepada publik, bahwa koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan basis ekonomi kerakyatan yang mampu bertahan, dan sampai saat ini perkembangan koperasi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dimana dalam kurun waktu lima tahun terakhir laju pertumbuhan koperasi di Indonesia rata-rata sebesar 4,25%. Fenomena ini menandakan bahwa koperasi di Indonesia terus menunjukkan perannya dalam pembangunan perekonomian nasional. Namun demikian koperasi di Indonesia juga tidak terlepas dari masalah internal yang ditandai dengan meningkatnya jumlah koperasi nonaktif. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan rata-rata koperasi non aktif di Indonesia yaitu sebesar 29,40%. Hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang dalam membangun koperasi dalam rangka pembangunan perekonomian nasional.

Koperasi non aktif ini tentunya disebabkan oleh beberapa hal yang mesti dicermati. Ada beberapa penyebab koperasi menjadi non aktif atau tidak dapat berkembang dengan baik yaitu adanya pandangan yang berkembang dalam masyarakat bahwa koperasi adalah usaha bersama yang diidentikkan dengan masyarakat golongan menengah ke bawah, kualitas sumberdaya manusia sebagai pengelola koperasi yang rendah, banyaknya pesaing yang berskala besar dengan usaha yang sejenis, keterbatasan modal, partisipasi anggota yang rendah,

perhatian pemerintah yang kurang, dan manajemen koperasi yang buruk.

Selain hambatan-hambatan internal dalam pengembangan koperasi tersebut, tantangan berat yang akan dihadapi koperasi di Indonesia yaitu adanya pasar global. Perusahaan-perusahaan besar akan masuk ke Indonesia dengan memanfaatkan peluang pasar yang terbuka bebas sehingga koperasi-koperasi yang mempunyai skala usaha kecil akan kalah bersaing dalam memasarkan produknya. Pasar global akan menempatkan perusahaan-perusahaan besar sebagai pemimpin pasar, sehingga koperasi akan semakin tertinggal jika tidak didukung dengan kapasitas yang mapan dan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Kesadaran masyarakat Indonesia dalam bergabung menjadi anggota koperasi tentunya menjadi daya dobrak yang kuat bagi pengembangan koperasi di Indonesia. Koperasi harus dikelola berdasarkan manajemen modern, sehingga koperasi yang terbentuk harus dikelola oleh tenaga-tenaga yang profesional dan didukung dengan kebijakan pemerintah yang pro pada koperasi. Disamping itu mentalitas dan kejujuran dalam pengelolaan koperasi akan sangat menentukan perkembangan koperasi Indonesia.

Makalah ini berusaha mencermati dan menganalisis perkembangan koperasi, serta menganalisis peluang dan tantangan jasa keuangan dalam pengembangan kapasitas koperasi di Indonesia.

2. METODOLOGI

2.1. Jenis dan Sumberdata

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan studi pustaka lain yang diperoleh melalui penelusuran di internet.

2.2. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis deskriptif merupakan

bentuk analisis sederhana yang bertujuan mendeskripsikan dan mempermudah penafsiran yang dilakukan dengan memberikan pemaparan dalam bentuk tabel. Lebih lanjut Nazir (1998), menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu cara dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada saat sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Analisis kuantitatif yaitu analisis yang menggunakan angka-angka dalam mengestimasi kondisi dan fenomena yang terjadi dan selanjutnya dideskripsikan maksud dari hasil analisis kuantitatif tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perkembangan Jumlah Koperasi di Indonesia

Koperasi dapat berkembang dengan baik manakala didukung dengan sumberdaya manusia yang handal,

sumberdaya modal yang efisien, dan aturan main yang fair. Sumberdaya manusia merupakan modal utama dalam pengembangan koperasi sebab pengelolaan koperasi akan berjalan dengan baik jika didukung dengan sumberdaya manusia yang kreatif dan profesional. Sumberdaya manusia kreatif adalah sumberdaya manusia yang mampu menyelesaikan masalah organisasi dalam kondisi apapun, sedangkan sumberdaya manusia profesional adalah sumberdaya manusia yang menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang ilmu dan keahliannya.

Disamping itu sumberdaya modal juga merupakan penentu dari pengembangan koperasi, sebab dalam membiayai sebuah usaha tentunya membutuhkan modal awal yang tidak dapat ditawar-tawar. Pengelolaan koperasi juga harus didukung dengan norma-norma yang menjadi pedoman dan batasan-batasan dalam perbuatan penyimpangan dan penyelewengan pengelolaan koperasi. Oleh karena itu koperasi harus didukung dengan aturan main yang fair untuk kesejahteraan anggotanya. Ciri dari pelaksanaan aturan main koperasi yang fair adalah koperasi yang langsung berdampak pada kesejahteraan anggotanya dan peningkatan daya saing perekonomian Bangsa. Perkembangan koperasi di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Koperasi di Indonesia dalam Kurun Lima Tahun Terakhir

Tahun	Jumlah Koperasi (unit)	Laju Pertumbuhan (%)	Aktif (unit)	Persentase Keaktifan (%)
2010	177.482	-	124.855	70,35
2011	188.181	6,03	133.666	71,03
2012	194.295	3,25	139.321	71,71
2013	205.597	5,82	143.117	69,61
2014	209.488	1,90	147.249	70,29
Rata-rata		4,25		70,60

Sumber: Data Kementerian Koperasi dan UKM diolah

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah koperasi di Indonesia terus meningkat dari

tahun ke tahun. Sementara dilihat dari jumlah yang aktif menunjukkan rata-rata

70,60 %. Pertumbuhan koperasi di Indonesia tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2011 dan pada tahun 2013 yaitu masing-masing 6,03% dan 5,82%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa koperasi di Indonesia mempunyai peran besar dalam memajukan perekonomian Bangsa. Namun demikian sekitar 29,40% koperasi di Indonesia masih diperlukan perhatian khusus karena dalam kondisi tidak aktif. Koperasi yang tidak aktif ini tentunya menjadi bahan evaluasi apa penyebabnya dan bagaimana mengembangkannya. Koperasi yang tidak aktif menjadi peluang dan tantangan untuk memajukan perekonomian Bangsa. Peluangnya adalah jumlah anggota yang tergabung didalamnya dapat diberdayakan kembali dan dapat menjadi produktif, disamping itu akan meningkatkan kebutuhan karyawan yang pada akhirnya mengurangi pengangguran. Sedangkan tantangan yang akan dihadapi dalam pengaktifan kembali koperasi adalah anggota yang tergabung didalamnya menjadi traumatik sebagai akibat dari ketidakpercayaan mereka terhadap koperasi yang pernah ada. Disamping itu juga koperasi yang akan diaktifkan membutuhkan modal yang

besar. Pemulihan kepercayaan anggota dan pelanggan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Dan karenanya kondisi ini dapat ditempuh dengan pendekatan aksi nyata dalam merekonstruksi tata kelola koperasi.

3.2. Perkembangan Jumlah Anggota dan Karyawan Koperasi di Indonesia

Koperasi akan mempunyai peran mensejahterakan anggotanya jika didukung dengan sumberdaya manusia yang handal dan modal usaha yang terus meningkat. Oleh karena itu peningkatan kompetensi karyawan sangat diharapkan untuk pengembangan koperasi di Indonesia. Pengembangan koperasi sangat bergantung dari pengelolaannya, sehingga sumberdaya manusia yang terlibat didalamnya harus dipastikan insan-insan yang memahami visi dan misi koperasi yaitu untuk usaha bersama dan kesejahteraan anggotanya. Berdasarkan misi koperasi tersebut maka diperlukan transparansi pengelolaan koperasi sehingga kinerjanya semakin baik dan produktif. Adapun perkembangan anggota dan karyawan koperasi di Indonesia ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan Anggota dan Karyawan Koperasi di Indonesia dalam Kurun Lima Tahun Terakhir

Tahun	Jumlah Anggota (orang)	Daya Serap (%)	Jumlah Karyawan (orang)	Daya Serap (%)
2010	30.461.121	-	326.718	-
2011	30.849.913	1,28	342.896	4,95
2012	33.869.439	9,79	393.502	14,76
2013	35.258.176	4,10	438.541	11,45
2014	36.443.953	3,36	530.830	21,04
Rata-rata		4,63		13,05

Sumber: Data Kementerian Koperasi dan UKM diolah

Pada Tabel 2 nampak bahwa peningkatan jumlah koperasi di Indonesia ikut meningkatkan daya serap anggota dan karyawan koperasi. Daya serap anggota koperasi tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 9,79% dengan daya serap

karyawan sebesar 14,76%. Hal ini menandakan bahwa kenaikan jumlah anggota diperlukan karyawan yang besar guna mengelola koperasi dengan baik. Sedangkan daya serap karyawan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar

21,04% dengan daya serap anggota sebesar 3,36%. Kondisi ini menunjukkan tidak signifikan antara serapan karyawan dengan jumlah anggota koperasi. Hal ini tetap memberikan dampak positif sebab peningkatan jumlah karyawan juga akan meningkatkan kinerja koperasi. Dampak positif meningkatnya jumlah anggota yang bergabung dalam koperasi yaitu akan meningkatkan modal sendiri dan pelanggan koperasi, selain itu anggota yang bergabung akan mendapatkan manfaat pembagian sisa hasil usaha dari pengelolaan usaha koperasi sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan. Selanjutnya peningkatan jumlah koperasi, juga akan berdampak pada peningkatan daya serap karyawan sehingga pengangguran di Indonesia dapat ditekan.

3.3. Perkembangan Modal Sendiri dan Modal Luar Koperasi di Indonesia

Tabel 3. Perkembangan Modal Sendiri dan Modal Luar Koperasi di Indonesia dalam Kurun Lima Tahun Terakhir

Tahun	Modal Sendiri (Rp. Juta)	Laju Pertumbuhan (%)	Modal Luar (Rp. Juta)	Laju Pertumbuhan (%)
2010	30.102.013,90	-	34.686.712,67	-
2011	35.794.284,64	18,91	39.689.952,51	14,42
2012	51.422.621,07	43,66	51.403.537,20	29,51
2013	89.536.290,61	74,12	80.840.572,48	57,27
2014	105.800.829,70	18,17	94.861.986,91	17,34
Rata-rata		38,72		29,64

Sumber: Data Kementerian Koperasi dan UKM diolah

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa dalam kurun lima tahun terakhir perkembangan jumlah modal sendiri terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah koperasi di Indonesia, begitupula modal luar terus menunjukkan peningkatan. Laju pertumbuhan modal sendiri tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 74,12% yang diikuti dengan laju pertumbuhan modal luar sebesar 57,27%. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan modal sendiri akan merangsang peningkatan jumlah modal luar yang

Perkembangan koperasi tidak terlepas dari dukungan modal yang dimiliki oleh koperasi itu sendiri. Hal ini penting sebab dalam membuka koperasi baru, maka akan membutuhkan modal dalam mengoperasikan usaha koperasi tersebut. Modal koperasi biasanya berasal dari dana yang dihimpun dari iuran wajib dan simpanan anggota. Selain modal sendiri tersebut koperasi juga dapat melakukan usaha-usaha dalam mendapatkan modal luar berupa pinjaman lunak dari pemilik modal besar. Oleh karena itu koperasi juga akan mempunyai ruang yang besar dalam meningkatkan kapasitas usahanya jika didukung dengan tambahan-tambahan modal dari luar. Adapun perkembangan modal yang dimiliki koperasi di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir disajikan pada Tabel 3.

dikembangkan koperasi. Peningkatan modal sendiri saling berkorelasi dengan peningkatan skala usaha termasuk pertumbuhan koperasi di Indonesia.

3.4. Distribusi Jumlah Koperasi di Indonesia Berdasarkan Wilayah

Perkembangan koperasi di Indonesia kedepan akan ditentukan kondisi koperasi saat ini. Semakin baik kinerja koperasi saat ini maka koperasi di Indonesia kedepan semakin maju, dan sebaliknya koperasi yang digambarkan saat ini dalam keadaan buruk, maka

koperasi Indonesia kedepan akan menjadi suram.

Jumlah koperasi yang ada di Indonesia pada Tahun 2014 mencapai 209.488 unit. Namun demikian dari jumlah koperasi tersebut yang aktif hanya sebanyak 147.249 atau sebesar 70,29% sedangkan sisanya sebanyak 62.239 unit atau 29,71% tidak aktif. Jumlah koperasi terbesar di Indonesia berada di Propinsi Jawa Timur, menyusul Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sedangkan jumlah koperasi terendah berada di Propinsi Kalimantan

Utara menyusul Propinsi Sulawesi Barat dan Bangka Belitung. Daya aktif tertinggi koperasi di Indonesia berada di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Bali dan Jawa Timur yaitu masing-masing 90,03%, 88,87%, dan 87,97% dan daya aktif terendah berada di Propinsi Papua Barat, Nangro Aceh Darusalam, dan Sumatera Utara yaitu masing-masing 49,22%, 50,67%, dan 54,60%. Adapun distribusi wilayah jumlah koperasi aktif dan tidak aktif dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Distribusi Wilayah Berdasarkan Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Indonesia Tahun 2014

Propinsi	Jumlah (unit)	Aktif (unit)	Daya Aktif (%)	Nonaktif (unit)	Daya Nonaktif (%)
Nanggroe Aceh Darussalam	7.428	3.764	50,67	3.664	49,33*
Sumatera Utara	12.286	6.708	54,60	5.578	45,40*
Sumatera barat	3.800	2.621	68,97	1.179	31,03
Riau	4.993	3.094	61,97	1.899	38,03
Jambi	3.685	2.291	62,17	1.394	37,83
Sumatera Selatan	5.852	4.336	74,09	1.516	25,91
Bengkulu	2.252	1.686	74,87	566	25,13
Lampung	4.833	3.041	62,92	1.792	37,08
Bangka Belitung	*1.058	836	79,02	222	20,98
Kepulauan Riau	2.252	1.391	61,77	861	38,23
DKI Jakarta	7.928	5.645	71,20	2.283	28,80
Jawa Barat	25.563*	15.633*	61,15	9.930	38,85
Jawa Tengah	27.784*	22.563*	81,21	5.221	18,79
D.I. Yogyakarta	2.610	2.269	86,93	341	13,07
Jawa Timur	30.850*	27.140*	87,97*	3.710	12,03
Banten	6.234	3.895	62,48	2.339	37,52
Bali	4.952	4.401	88,87*	551	11,13
Nusa Tenggara Barat	3.966	2.283	57,56	1.683	42,44
Nusa Tenggara Timur	3.130	2.818	90,03*	312	9,97
Kalimantan Barat	4.781	2.871	60,05	1.910	39,95
Kalimantan Tengah	3.105	2.268	73,04	837	26,96
Kalimantan Selatan	2.571	1.669	64,92	902	35,08
Kalimantan Timur	5.184	3.524	67,98	1.660	32,02
Kalimantan Utara	*735	426	57,96	309	42,04
Sulawesi Utara	6.038	3.426	56,74	2.612	43,26
Sulawesi Tengah	2.246	1.470	65,45	776	34,55
Sulawesi Selatan	8.556	5.318	62,16	3.238	37,84
Sulawesi Tenggara	3.368	2.616	77,67	752	22,33

Gorontalo	1.148	741	64,55	407	35,45
Sulawesi Barat	*985	735	74,62	250	25,38
Maluku	3.225	2.370	73,49	855	26,51
Papua	3.101	1.784	57,53	1.317	42,47
Maluku Utara	1.394	831	59,61	563	40,39
Papua Barat	1.595	785	49,22	810	50,78*
Nasional	209.488	147.249	70,29	62.239	29,71

Sumber: Data Kementerian Koperasi dan UKM diolah

Koperasi aktif mempunyai pengaruh besar terhadap pembangunan perekonomian Bangsa. Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat merupakan wilayah basis koperasi di Indonesia sehingga pelayanan jasa keuangan yang berbasis syariah di daerah ini merupakan sasaran utama yang mesti diperhatikan. Tetapi peningkatan pelayanan jasa keuangan di Propinsi Jawa

Barat tentunya perlu didukung dengan pembinaan yang kuat karena daya aktifnya hanya diangka 61,15%. Pembinaan koperasi nonaktif dimaksudkan agar lebih merangsang pertumbuhan dan kapasitas serta daya saing terhadap produk-produk yang akan dihasilkan. Peningkatan kinerja koperasi dibutuhkan manajemen yang baik dan pemberdayaan karyawan yang berkompentensi.

Tabel 5. Distribusi Wilayah Berdasarkan Jumlah Anggota dan Karyawan Koperasi di Indonesia Tahun 2014

Propinsi	Anggota (orang)	Persentase (%)	Karyawan (orang)	Persentase (%)
Nanggroe Aceh Darussalam	500.202	1,37	5.438	1,02
Sumatera Utara	2.116.386	5,81	10.862	2,05
Sumatera barat	516.139	1,42	4.622	0,87
Riau	545.025	1,50	5.380	1,01
Jambi	367.962	1,01	3.625	0,68
Sumatera Selatan	630.738	1,73	7.898	1,49
Bengkulu	176.640	0,48	*979	0,18
Lampung	681.948	1,87	6.961	1,31
Bangka Belitung	106.558	0,29	3.954	0,74
Kepulauan Riau	182.449	0,50	1.087	0,20
DKI Jakarta	879.795	2,41	13.589	2,56
Jawa Barat	5.974.375*	16,39	53.554*	10,09
Jawa Tengah	7.042.617*	19,32	131.179*	24,71
D.I. Yogyakarta	691.575	1,90	7.320	1,38
Jawa Timur	7.522.356*	20,64	148.410*	27,96
Banten	919.307	2,52	13.542	2,55
Bali	993.434	2,73	22.815	4,30
Nusa Tenggara Barat	626.117	1,72	7.064	1,33
Nusa Tenggara Timur	698.470	1,92	6.897	1,30
Kalimantan Barat	1.404.010	3,85	6.588	1,24
Kalimantan Tengah	346.780	0,95	2.454	0,46

Kalimantan Selatan	336.833	0,92	3.586	0,68
Kalimantan Timur	340.076	0,93	6.793	1,28
Kalimantan Utara	*50.284	0,14	*829	0,16
Sulawesi Utara	422.960	1,16	9.499	1,79
Sulawesi Tengah	267.768	0,73	2.825	0,53
Sulawesi Selatan	1.165.554	3,20	13.473	2,54
Sulawesi Tenggara	245.538	0,67	12.455	2,35
Gorontalo	135.831	0,37	2.045	0,39
Sulawesi Barat	*62.718	0,17	1.030	0,19
Maluku	173.863	0,48	6.638	1,25
Papua	188.536	0,52	3.884	0,73
Maluku Utara	71.581	0,20	2.641	0,50
Papua Barat	*59.528	0,16	*914	0,17
Nasional	36.443.953	100,00	530.830	100,00

Sumber: Data Kementerian Koperasi dan UKM diolah

Tabel 6. Distribusi Wilayah Berdasarkan Jumlah Modal Sendiri dan Modal Luar Koperasi di Indonesia Tahun 2014

Propinsi	Jumlah Modal (Rp. Juta)	Modal Sendiri (Rp. Juta)	Persent (%)	Modal Luar (Rp. Juta)	Persent (%)
Nanggroe Aceh Darusalam	8.064.530,86	5.757.567,01	71,39	2.306.963,85	28,61
Sumatera Utara	4.579.129,26	3.058.351,43	66,79	1.520.777,83	33,21
Sumatera barat	3.144.140,60	1.688.768,97	53,71	1.455.371,63	46,29
Riau	2.850.301,23	993.384,10	34,85	1.856.917,13	65,15
Jambi	779.210,60	411.310,79	52,79	367.899,81	47,21
Sumatera Selatan	1.281.375,78	691.012,02	53,93	590.363,76	46,07
Bengkulu	371.247,01	249.823,46	67,29	121.423,55	32,71
Lampung	3.976.610,60	2.242.192,60	56,38	1.734.418,00	43,62
Bangka Belitung	304.364,95	174.632,94	57,38	129.732,01	42,62
Kepulauan Riau	151.217,00	119.987,00	79,35*	31.230,00	20,65
DKI Jakarta	18.102.478,97	9.948.463,25	54,96	8.154.015,72	45,04
Jawa Barat	48.164.753,24	32.374.439,51 *	67,22	15.790.313,73 *	32,78
Jawa Tengah	41.455.496,29	18.326.995,85 *	44,21	23.128.500,44 *	55,79
D.I. Yogyakarta	1.424.333,73	594.123,66	41,71	830.210,07	58,29
Jawa Timur	33.101.481,19	13.294.708,78 *	40,16	19.806.772,41 *	59,84
Banten	3.528.236,94	1.797.875,74	50,96	1.730.361,20	49,04
Bali	7.284.672,34	1.959.413,70	26,90	5.325.258,64	73,10*
Nusa Tenggara Barat	1.677.122,03	770.349,23	45,93	906.772,80	54,07
Nusa Tenggara Timur	2.823.847,26	1.161.695,92	41,14	1.662.151,34	58,86

Kalimantan Barat	4.270.220,20	2.593.061,97	60,72	1.677.158,23	39,28
Kalimantan Timur	1.718.219,00	573.771,00	33,39	1.144.448,00	66,61
Kalimantan Selatan	950.847,49	484.802,03	50,99	466.045,46	49,01
Kalimantan Tengah	1.594.684,60	526.110,60	32,99	1.068.574,00	67,01*
Kalimantan Utara	2.315.888,00	2.228.244,00	96,22*	87.644,00	3,78
Sulawesi Utara	695.817,26	388.037,43	55,77	307.779,83	44,23
Sulawesi Tengah	586.079,33	344.058,07	58,71	242.021,26	41,29
Sulawesi Selatan	3.633.692,22	2.107.602,09	58,00	1.526.090,13	42,00
Sulawesi Tenggara	146.844,00	97.011,00	66,06	49.833,00	33,94
Gorontalo	375.978,92	145.702,33	38,75	230.276,59	61,25
Sulawesi Barat	80.345,50	37.638,45	46,85	42.707,05	53,15
Maluku	259.467,81	178.386,40	68,75	81.081,41	31,25
Papua	412.829,12	301.619,33	73,06*	111.209,79	26,94
Maluku Utara	156.713,14	80.597,88	51,43	76.115,26	48,57
Papua Barat	400.640,19	99.091,21	24,73	301.548,98	75,27*
Nasional	200.662.816,66	105.800.829,75	52,73	94.861.986,91	47,27

Sumber: Data Kementerian Koperasi dan UKM diolah

Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa jumlah anggota yang bergabung dalam koperasi di Indonesia sebanyak 36.443.953 orang dan karyawan koperasi sebanyak 530.830 orang. Jumlah anggota dan karyawan koperasi terbanyak di Indonesia berada di Propinsi Jawa Timur, menyusul Jawa Tengah, dan Jawa Barat yaitu masing-masing 20,64%, 19,32, dan 16,39. Kondisi ini menggambarkan bahwa propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat mempunyai andil besar dalam memajukan koperasi di Indonesia. Jumlah anggota koperasi terendah di Indonesia berada di Propinsi Kalimantan Utara, Papua Barat, dan Sulawesi Barat yaitu masing-masing 0,14%, 0,16%, dan ,17%. Sedangkan jumlah karyawan terendah berada di propinsi Kalimantan Utara, Papua Barat, dan Bengkulu yaitu masing-masing ,16%, 0,17, dan 0,18. Propinsi Bengkulu tidak termasuk posisi ke-3 terendah jumlah anggotanya, tetapi jumlah

karyawannya berada pada posisi ke-3 terendah. Hal ini memberi gambaran bahwa koperasi yang mempunyai jumlah anggota besar tidak harus proporsional dengan peningkatan jumlah karyawannya begitupula sebaliknya. Jumlah anggota besar belum tentu mempunyai skala usaha koperasi besar begitupula sebaliknya. Oleh karena itu penting dipahami bahwa jumlah anggota koperasi yang besar seyogyanya diiringi dengan peningkatan sakala usaha secara proporsional. Hal ini penting karena peningkatan jumlah anggota koperasi tentunya peningkatan kebutuhan para anggota koperasi itu juga makin meningkat.

Pada Tabel 6 menunjukkan modal sendiri tertinggi yang dimiliki koperasi ada di Propinsi Jawa Barat, menyusul Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sedangkan modal luar tertinggi ada di Propinsi Jawa Tengah, menyusul Jawa Timur dan Jawa Barat. Propinsi Jawa Timur memiliki

persentase modal sendiri sebesar sebesar 40, 16% dan modal luar sebesar 59,84%. Propinsi Jawa Tengah memiliki modal sendiri yaitu sebesar 44, 21% dan modal luar sebesar 55,79%. Propinsi Jawa Barat memiliki modal sendiri yaitu sebesar 67,22% dan modal luar sebesar 32,78%. Dari ketiga propinsi terbesar yang memiliki modal, maka proporsi modal luar terbesar yaitu ada di Propinsi Jawa Timur, menyusul Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Proporsi modal luar tertinggi ada di Propinsi Papua Barat yaitu sebesar 75,27%, menyusul Propinsi Bali sebesar 73,10%, dan Propinsi Kalimantan Tengah sebesar 67,01%. Tetapi dari jumlah modal sendiri ditempati Propinsi Bali dan Kalimantan Tengah. Sedangkan proporsi modal sendiri tertinggi ada di Propinsi Kalimantan Utara yaitu sebesar 96,22%, menyusul Kepulauan Riau 79,35% dan Papua sebesar 73,06%.

Menarik dikaji bahwa peningkatan jumlah koperasi, jumlah anggota, dan karyawan terbesar berada di Propinsi Jawa Timur dengan proporsi modal luar tertinggi dibanding Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah anggota koperasi di Indonesia akan menyerap karyawan dan modal luar makin tinggi. Implikasi dari pengembangan koperasi tentunya harus dibarengi dengan peningkatan modal luar,

sebab anggota koperasi mempunyai kebutuhan yang tinggi sehingga untuk memenuhi kebutuhan para anggota tersebut diperlukan karyawan dan modal luar yang cukup tinggi. Oleh karena itu peran dari jasa keuangan untuk meningkatkan kapasitas koperasi di Indonesia sangat diperlukan. Peran tersebut bukan hanya dalam bentuk penguatan modal, tetapi pembinaan, pendampingan, dan sebagai mitra yang intim dengan koperasi sangat dibutuhkan. Dampak yang akan muncul dari peran aktif jasa keuangan tersebut tentunya akan memacu kinerja koperasi dan perekonomian bangsa Indonesia.

3. 5. Analisis Korelasi Antar Variabel

Perkembangan koperasi di Indonesia tentunya tidak terlepas dari saling pengaruh antar variabel penentunya. Variabel yang dimaksud yaitu variabel koperasi aktif, jumlah anggota, karyawan, modal, dan sisa hasil usaha yang diperoleh. Hasil analisis dari korelasi antar variabel menunjukkan bahwa jumlah koperasi aktif, total koperasi nasional, koperasi tidak aktif, jumlah anggota koperasi, jumlah karyawan, modal sendiri, sisa hasil usaha mapun modal luar mempunyai hubungan yang erat antar variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Hasil analisis korelasi antar variabel ditampilkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Korelasi Antar Variabel

	Jmlh Koperasi Aktif	Jmlh Koperasi	Koperasi Tidak Aktif	Jmlh Anggota Koperasi	Jmlh Karyawan Koperasi	Modal Sendiri	Modal Luar	SHU
Jmlh Koperasi Aktif	1	,985(**)	,805(*)	,950(**)	,921(**)	,786(*)	,831(**)	,761(*)
Jmlh Koperasi	,985(*)	1	,892(*)	,937(**)	,886(**)	,801(*)	,824(**)	,762(*)
Koperasi Tidak Aktif	,805(*)	,892(**)	1	,760(**)	,661(**)	,709(*)	,664(**)	,643(*)
Jmlh Anggota Koperasi	,950(*)	,937(**)	,760(*)	1	,894(**)	,842(*)	,880(**)	,775(*)
Jmlh	,921(*)	,886(**)	,661(*)	,894(**)	1	,728(*)	,788(**)	,668(*)

Karyawan Koperasi	*))	*)))	*))	*)
Modal Sendiri	,786(*)	,801(**)	,709(*)	,842(**)	,728(**)	1	,896(**)	,795(*)
Modal Luar	,831(*)	,824(**)	,664(*)	,880(**)	,788(**)	,896(*)	1	,834(*)
SHU	,761(*)	,762(**)	,643(*)	,775(**)	,668(**)	,795(*)	,834(**)	1

Sumber: Data Kementerian Koperasi dan UKM diolah

Pada Tabel 7 menunjukkan bahwa jumlah koperasi aktif, total koperasi nasional, koperasi tidak aktif, jumlah anggota koperasi, jumlah karyawan, modal sendiri, sisa hasil usaha maupun modal luar saling berkorelasi erat antar variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah koperasi aktif berkorelasi erat dengan jumlah koperasi yang ditunjukkan angka 0,985. Nilai ini mempunyai makna bahwa bertambahnya jumlah koperasi aktif sebesar 1% akan berkorelasi dengan jumlah koperasi sebesar 0,985%. Hal ini wajar karena dengan bertambahnya jumlah koperasi aktif, maka akan mendorong bertambahnya jumlah koperasi di Indonesia sebab gairah koperasi aktif ini akan mengembangkan koperasi-koperasi baru di Indonesia.
2. Jumlah koperasi aktif berkorelasi erat dengan jumlah koperasi tidak aktif yang ditunjukkan angka 0,805. Nilai ini mempunyai makna bahwa bertambahnya jumlah koperasi aktif sebesar 1% akan berkorelasi dengan jumlah koperasi tidak aktif sebesar 0,805%. Hubungan tersebut berkorelasi negatif artinya bertambahnya jumlah koperasi aktif, maka akan mengurangi jumlah koperasi tidak aktif. Oleh karena itu kontribusi dari pengembangan koperasi aktif akan menekan angka koperasi yang aktif. Kondisi ini mengilustrasikan agarekan angka koperasi yang aktif. Kondisi ini mengilustrasikan agar koperasi yang aktif terus ditingkatkan sehingga juga akan berdampak padapeningkatan kinerja ekonomi koperasi.
3. Jumlah koperasi aktif berkorelasi erat dengan jumlah anggota koperasi yang ditunjukkan angka 0,950. Nilai ini mempunyai makna bahwa bertambahnya jumlah koperasi aktif sebesar 1% akan berkorelasi dengan jumlah anggota koperasi sebesar 0,950%. Hal ini wajar karena dengan bertambahnya jumlah koperasi aktif, maka akan mendorong bertambahnya jumlah anggota koperasi di Indonesia sebab gairah koperasi aktif ini akan mengembangkan koperasi-koperasi baru di Indonesia yang tentu saja akan menyerap anggota dalam skala besar.
4. Jumlah koperasi aktif berkorelasi erat dengan jumlah karyawan koperasi yang ditunjukkan angka 0,921. Nilai ini mempunyai makna bahwa bertambahnya jumlah koperasi aktif sebesar 1% akan berkorelasi dengan jumlah karyawan koperasi sebesar 0,921%. Hal ini wajar karena dengan bertambahnya jumlah koperasi aktif, maka akan mendorong bertambahnya jumlah karyawan koperasi di Indonesia sebab gairah koperasi aktif ini akan mengembangkan koperasi-koperasi baru di Indonesia yang tentu saja juga akan menyerap karyawan ebagai pengelola koperasi.
5. Jumlah koperasi aktif berkorelasi erat dengan jumlah modal sendiri koperasi yang ditunjukkan angka 0,786. Nilai ini mempunyai makna bahwa bertambahnya jumlah koperasi aktif sebesar 1% akan berkorelasi dengan jumlah modal sendiri koperasi sebesar

0,786%. Hal ini wajar karena dengan bertambahnya jumlah koperasi aktif, maka akan mendorong kebutuhan modal koperasi itu sendiri.

6. Jumlah koperasi aktif berkorelasi erat dengan jumlah koperasi yang ditunjukkan angka 0,831. Nilai ini mempunyai makna bahwa bertambahnya jumlah koperasi aktif sebesar 1% akan berkorelasi dengan jumlah modal luar koperasi sebesar 0,831%. Hal ini wajar karena dengan bertambahnya jumlah koperasi aktif, maka akan bertambahnya jumlah tambahan yang dibutuhkan koperasi di Indonesia sebab gairah koperasi aktif ini akan berkinerja baik, manakala didukung dengan modal yang cukup.
7. Jumlah koperasi aktif berkorelasi erat dengan sisa hasil usaha koperasi yang ditunjukkan angka 0,761. Nilai ini mempunyai makna bahwa bertambahnya jumlah koperasi aktif sebesar 1% akan berkorelasi dengan jumlah koperasi sebesar 0,761%. Hal ini wajar karena dengan bertambahnya jumlah koperasi aktif, maka akan mendorong bertambahnya sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh di Indonesia sebab gairah koperasi aktif ini akan mengembangkan koperasi-koperasi baru di Indonesia.

3.6. Tantangan Pengembangan Koperasi di Indonesia

Meskipun koperasi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun masalah-masalah dalam koperasi akan terus menghantui perkembangan koperasi di Indonesia. Masalah-masalah koperasi yang klasik saat ini yang masih saja ditemukan yaitu:

1. Keanggotaan tercermin kuantitasnya semakin meningkat tetapi tingkat pendidikan mereka yang pada umumnya masih rendah, ketrampilan dan keahlian yang dimiliki oleh para anggota terbatas, sebagian dari anggota belum menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai anggota. Kebanyakan anggota koperasi belum menyadari

bahwa koperasi merupakan suatu wadah usaha yang dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan mereka. Partisipasi mereka dalam kegiatan organisasi juga masih harus ditingkatkan. Apabila suatu koperasi mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) banyak anggotanya yang tidak hadir. Akibatnya keputusan-keputusan yang dihasilkan tidak mereka rasakan sebagai keputusan yang mengikat. Banyaknya anggota yang tidak mau bekerjasama dan mereka juga memiliki banyak utang kepada koperasi, hal ini menyebabkan modal yang ada dikoperasi semakin berkurang.

2. Pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan anggota pengurusnya masih belum memadai. Pengurus belum mampu melaksanakan tugas mereka dengan semestinya. Pengurus kurang berdedikasi terhadap kelangsungan hidup koperasi. Ini berarti bahwa kepribadian dan mental pengurus, pengawas, manajer belum berjiwa koperasi sehingga harus diperbaiki lagi. Pengurus kadang-kadang tidak jujur. Masih ada koperasi yang anggota pengurusnya kurang berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya. Kursus-kursus yang diselenggarakan untuk pengurus koperasi sering tidak mereka hadiri. Dalam kepemimpinan koperasi sampai saat ini masih belum ada pembagian tugas yang jelas. Pengurus koperasi kebanyakan yang sudah lanjut usia dan para tokoh masyarakat yang sudah memiliki jabatan ditempat lain, sehingga perhatiannya terhadap koperasi berkurang. Pengurus masih belum mampu berkoordinasi dengan anggota, manajer, pengawas, dan instansi pemerintah dengan baik.
3. Anggota dari badan pengawas koperasi banyak yang belum berfungsi. Hal ini disebabkan oleh :
 - a. Kemampuan anggota pengawas yang belum memadai, terlebih jika

dibandingkan dengan semakin meningkatnya usaha koperasi. Di pihak lain, pembukuan koperasi biasanya belum lengkap dan tidak siap untuk diperiksa.

- b. Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas koperasi sekunder dan kantor koperasi juga belum banyak membantu perkembangan kemampuan anggota pengawas ataupun peningkatan pembukuan koperasi. Pemeriksaan yang mereka lakukan terutama mengarah pada kepentingan permohonan kredit.
4. Iklim yang mendukung pertumbuhan koperasi belum selaras dengan kehendak anggota koperasi, seperti kebijakan pemerintah yang belum jelas dan efektif untuk koperasi, sistem prasarana, pelayanan, pendidikan, dan penyuluhan.
5. Banyaknya badan usaha lain yang bergerak pada bidang usaha yang sama dengan koperasi.
6. Kurangnya fasilitas-fasilitas yang dapat menarik perhatian masyarakat dan masih banyaknya masyarakat yang tidak mempercayai koperasi.
7. Pengurus koperasi kadangkala merangkap jabatan birokratis, politis atau jabatan kemasyarakatan, sehingga terjadinya konflik peran. Konflik yang berlatarbelakang non koperasi dapat terbawa kedalam lembaga koperasi, sehingga mempengaruhi citra koperasi.

Menurut Ace Partadiredja dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan koperasi Indonesia adalah rendahnya tingkat kecerdasan masyarakat Indonesia. Lebih lanjut Baharuddin mengatakan bahwa faktor penghambat dalam pembangunan koperasi adalah kurangnya dedikasi pengurus terhadap kelangsungan hidup koperasi. Ini berarti bahwa kepribadian dan mental pengurus, pengawas, dan manajer belum berjiwa koperasi sehingga masih perlu diperbaiki lagi. Selanjutnya Prof. Wagiono Ismail berpendapat bahwa faktor penghambat

kemajuan koperasi adalah kurangnya kerja sama di bidang ekonomi dari masyarakat kota. Kerja sama di bidang sosial (gotong royong) memang sudah kuat, tetapi kerja sama di bidang usaha dirasakan masih lemah, padahal kerja sama di bidang ekonomi merupakan faktor yang sangat menentukan kemajuan lembaga koperasi (Anonim, 2013).

Ketiga masalah di atas merupakan inti dari masalah manajemen koperasi dan merupakan kunci maju atau tidaknya koperasi di Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas koperasi, diperlukan keterkaitan timbal balik antara manajemen profesional dan dukungan kepercayaan dari anggota. Mengingat tantangan yang harus dihadapi koperasi pada waktu yang akan datang semakin besar, maka koperasi perlu dikelola dengan menerapkan manajemen yang profesional serta menetapkan kaidah efektivitas dan efisiensi. Untuk keperluan ini, koperasi dan pembina koperasi perlu melakukan pembinaan dan pendidikan yang lebih intensif untuk tugas-tugas operasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, apabila belum mempunyai tenaga profesional yang tetap, dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang terkait (Anonim, 2013).

3.7. Penguatan Kapasitas Koperasi

Keistimewaan koperasi tidak dikenal adanya majikan dan buruh, serta tidak ada istilah pemegang saham mayoritas. Semua anggota berposisi sama, dengan hak suara sama. Oleh karena itu, apabila aktivitas produksi yang dilakukan koperasi ternyata dapat memberi laba finansial, semua pihak akan turut menikmati laba tersebut. Untuk mengembangkan koperasi banyak hal yang perlu dibenahi, baik keadaan internal maupun eksternal. Di sisi internal, dalam tubuh koperasi masih banyak virus yang merugikan. Yang paling berbahaya adalah penyalahgunaan koperasi sebagai wahana sosial politik. Manuver koperasi pada akhirnya bukan ditujukan untuk kemajuan

koperasi dan kesejahteraan anggota, melainkan untuk keuntungan politis kelompok tertentu (Anonim, 2013).

Dekan Fakultas Administrasi Bisnis universitas Nebraska Gaay Schwediman, berpendapat bahwa untuk kemajuan koperasi maka manajemen tradisional perlu diganti dengan manajemen modern yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a) semua anggota diperlakukan secara adil,
- b) didukung administrasi yang canggih,
- c) koperasi yang kecil dan lemah dapat bergabung (merjer) agar menjadi koperasi yang lebih kuat dan sehat,
- d) pembuatan kebijakan dipusatkan pada sentra-sentra yang layak,
- c) petugas pemasaran koperasi harus bersifat agresif dengan menjemput bola bukan hanya menunggu pembeli,
- d) kebijakan penerimaan pegawai didasarkan atas kebutuhan, yaitu yang terbaik untuk kepentingan koperasi,
- e) manajer selalu memperhatikan fungsi perencanaan dan masalah yang strategis,
- f) memprioritaskan keuntungan tanpa mengabaikan pelayanan yang baik kepada anggota dan pelanggan lainnya,
- g) perhatian manajemen pada faktor persaingan eksternal harus seimbang dengan masalah internal dan harus selalu melakukan konsultasi dengan pengurus dan pengawas,
- h) keputusan usaha dibuat berdasarkan keyakinan untuk memperhatikan kelangsungan organisasi dalam jangka panjang,
- i) selalu memikirkan pembinaan dan promosi karyawan,
- j) pendidikan anggota menjadi salah satu program yang rutin untuk dilaksanakan.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis perkembangan koperasi di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Koperasi di Indonesia akan terus meningkat yang ditandai dengan trend

pertumbuhan dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu rata-rata sebesar 4,25% dengan rata-rata keaktifan sebesar 70,68%. Perkembangan jumlah koperasi di Indonesia mempunyai daya serap anggota sebesar 4,63% dan daya serap karyawan sebesar 13,05%. Perkembangan koperasi di Indonesia berdampak pada peningkatan perputaran modal koperasi, yang ditandai dengan peningkatan modal sendiri sebesar 38,72% dan peningkatan modal luar sebesar 29,64%. Penyumbang terbesar perkembangan koperasi di Indonesia di dominasi oleh wilayah Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Perkembangan jumlah koperasi di Indonesia berhubungan positif terhadap jumlah koperasi aktif, jumlah serapan anggota, jumlah serapan karyawan, jumlah modal sendiri, jumlah modal luar, dan sisa hasil usaha.

2. Pengembangan kapasitas koperasi diperlukan peningkatan modal luar melalui peran aktif dari lembaga jasa keuangan. Peran tersebut bukan hanya dalam bentuk penguatan modal, tetapi pembinaan, pendampingan, dan sebagai mitra yang intim dengan koperasi sangat dibutuhkan.
3. Pengembangan kapasitas koperasi di Indonesia diperlukan penerapan manajemen modern yang bercirikan semua anggota diperlakukan secara adil, didukung dengan administrasi yang canggih, koperasi yang kecil dan lemah bergabung (merjer) agar menjadi koperasi yang lebih kuat dan sehat, pembuatan kebijakan dipusatkan pada sentra-sentra yang layak, petugas pemasaran koperasi harus bersifat agresif dengan menjemput bola bukan hanya menunggu pembeli, kebijakan penerimaan pegawai didasarkan atas kebutuhan, manajer selalu memperhatikan fungsi perencanaan dan masalah yang strategis, memprioritaskan keuntungan tanpa mengabaikan pelayanan yang baik

kepada anggota dan pelanggan lainnya, perhatian manajemen pada faktor persaingan eksternal harus seimbang dengan masalah internal dan harus selalu melakukan konsultasi dengan pengurus dan pengawas, keputusan usaha dibuat berdasarkan keyakinan untuk memperhatikan kelangsungan organisasi dalam jangka panjang, selalu memikirkan pembinaan dan promosi karyawan, pendidikan anggota menjadi salah satu program yang rutin untuk dilaksanakan

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2011. *Faktor Penghambat Perkembangan Koperasi*. <https://kikizone.wordpress.com/2011/10/25/faktor-penghambat-perkembangan-koperasi/>, Diakses 20 Maret 2015.
- Anonim. 2013. *Solusi Permasalahan Koperasi*. <http://kusuma-wulandari.blogspot.com/2013/01/bab-xv-solusi-permasalahan-koperasi.html>. Diakse 20 Maret 2015.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2014. *Data Koperasi*. <https://depkop.go.id>. Diakses 20 Maret 2015.
- Nazir M. 1998. *Metodologi Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.